

KETERKAITAN ANTARA MODAL SOSIAL DENGAN EFISIENSI KELEMBAGAAN PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN SIDOGIRI, PASURUAN

FARAH DILLA KUTSIYAH

Institut Agama Islam Negeri Madura
E-mail: keindahanmaduraku@gmail.com

AGOES KAMAROELLAH

Institut Agama Islam Negeri Madura
E-mail: agoes.kamaroellah.stain@gmail.com

UMMU KULSUM

Universitas Islam Madura
E-mail: ummu_kulsum@yahoo.com

Abstract

Sidogiri Islamic Boarding School is one of the oldest Islamic boarding schools and is capable of being independent in its operational activities by having very rich resources and this institution is also an example of success in developing Islamic economics. The definition of "institution" in this article is how the rules are implemented in the pesantren's economic activities that are deeply tied to the social capital that they have. This study uses a case study qualitative approach. Data collection through observation, documentation and in-depth interviews. The results of the study show that social capital that is embedded in the pesantren environment can reduce transaction costs so that the institutional of Sidogiri Islamic Boarding School cooperative is more efficient. Network can reduce the cost of information, negotiation, coordination and supervision. Norms can decrease the occurrence of irregularities and the existence of trust. Shared vision can facilitate coordination and increase motivation. It is recommended that the application of social capital in the management of the Sidogiri kopontren be able to be transferred some other pesantren that are still lagging behind in economic development so that they are able to be independent and can help the economic problems of the community.

Keywords: *Institutional Efficiency, Islamic Boarding School, Social Capital*

PENDAHULUAN

Sumber daya melimpah telah dimiliki oleh beberapa pesantren di Indonesia, sebagai contoh adalah Pondok Pesantren Sidogiri dengan koperasinya yang beraset miliaran rupiah, data terakhir menyebutkan sudah mencapai trilyunan rupiah. Ketika seluruh sumberdaya dan keunggulannya mampu ditransfer kepada pesantren-pesantren lain

yang kebetulan kurang berpengalaman niscaya pesantren akan menjadi kekuatan luar biasa yang mampu menggerakkan perubahan sosial dari lingkungan dimana ia berada. Jaringan antar pesantren ketika mampu dibangun dengan baik maka keberadaan pesantren benar-benar akan mampu menjadi pusat peradaban. Ini tentu bukan impian belaka. Karena kalau dengan menghitung jumlah

sumberdaya yang dimiliki pesantren di seluruh Indonesia, tentu hal ini adalah sesuatu yang tidak mustahil (Maulani, 2016). Data statistik tahun 2003, jumlah pesantren di Indonesia mencapai 14.067 (Depag, 2004) dengan 30.000 kiai dan 3,1 juta santri (Kompas, 2004). Tahun 2005 meningkat sekitar 17.000 pesantren (Ridwan, 2005). Tahun 2011 meningkat lagi menjadi 27.218 pesantren dengan proporsi pesantren salafiyah 49.4%, khalafiyah 11.3% dan kombinasi 39.3% dengan total santri 3.642.738 (Kemenag, 2016). Data Kementerian Agama mencatat jumlah santri pondok pesantren di 33 provinsi di seluruh Indonesia tahun 2016 mencapai 3.962.700 orang yang tersebar di 25.938 pesantren (Pendis Kemenag, 2016)

Pondok pesantren Sidogiri didirikan pada tahun 1718/1745 M. Lembaga ini merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia (Tamassya, 2017). Ia juga sebagai contoh sukses dalam pengembangan ekonomi syariah, dengan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) UGT yang hingga kini terus melebarkan sayapnya ke berbagai wilayah di seluruh penjuru Indonesia. Pesantren ini kini menjadi rujukan tempat belajar ekonomi syariah pesantren lain. Kini Sidogiri bukan lagi sekedar pesantren yang mengajarkan kitab kuning, melainkan telah menjadi lembaga ekonomi dan sosial dibawah payung Sidogiri *Network Forum* (SNF) dengan serangkaian usaha meliputi (1) koperasi pesantren (2) BMT Masalah (3) BMT UGT Usaha Gabungan Terpadu (4) BPR Syariah Ummu (jasa Keuangan) (5) koperasi Agro (6) SBC Sidogiri (diklat profesi jasa

keuangan syariah) (7) LAZ Sidogiri (Lembaga Amil Zakat) (8) L-KAF Sidogiri (Lembaga Wakaf) (9) IASS Sidogiri (Ikatan Alumni Santri) (10) majalah *Buletin* Sidogiri, dan (11) Penerbitan Pustaka Sidogiri. Dapat dikatakan bahwa Pesantren Sidogiri telah menerapkan kewirausahaan sosial (Reginald & Mawardi, 2014)

Strategi Sidogiri dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) adalah: pertama, penguatan kapital manusia sehingga masyarakat mampu untuk melakukan proses pemberdayaan dirinya (Fatoni, 2006). Kedua, penguatan modal sosial melalui beberapa cara yakni menjalin jaringan sosial dengan masyarakat, alumni, wali santri dan institusi keuangan serta kepercayaan (*trust*) dibangun dengan melakukan program-program internalisasi nilai dan pentingnya mencapai nilai tersebut (Muktirahman, 2017). Senada dengan Fatoni (2006) modal sosial tersebut dapat dilihat dari dinamika masyarakat Sidogiri di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, dengan cara membangun jaringan, baik di internal Sidogiri maupun dengan personal atau institusi-institusi yang dibutuhkan. Mereka kemudian membangun relasi dengan pihak perbankan, pemerintah, kelompok-kelompok sosial, dan sebagainya. Kedua, menumbuhkan kepercayaan di internal Sidogiri sehingga memunculkan makna bersama.

Inti dasar dari “kelembagaan” adalah bagaimana aturan formal, dan aturan informal di implementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dan pada realitasnya, dalam

kegiatan ekonomi pesantren terikat dengan modal sosial, artinya modal tersebut mempengaruhi bagaimana para pelaku ekonomi berperilaku untuk memperoleh manfaat (*benefit*) dan tambahan materi (*profit*) yang diinginkan (Kutsiyah, 2009). Oleh karena itu sangat penting memasukkan persepsi dan pemahaman tentang identitas bersama, ketaatan terhadap norma kedalam karakterisasi pilihan dan perilaku dalam ilmu ekonomi (Sen, 2007). Atau merunut istilah yang sering dipaparkan dalam teori ekonomi kelembagaan, bahwa sebuah kemustahilan memahami ekonomi terpisah dari nilai-nilai budaya, norma, dan struktur sosial masyarakat (Fukuyama, 2002).

Teori ekonomi kelembagaan menyebutkan, peranan kelembagaan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena: (1) lembaga membentuk hak milik dan insentif ekonomi (Pressman, 2000) (2) memfasilitasi tindakan kolektif untuk hubungan yang saling menguntungkan, karena adanya modal sosial (3) memperkuat aturan main dalam perekonomian seperti manajemen konflik, mengurangi ketidakpastian dan kerjasama (Streeten, 2002).

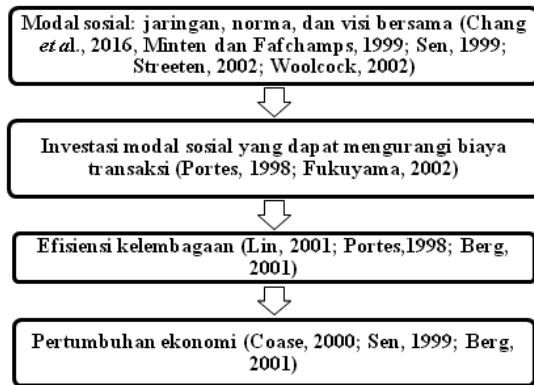
Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren sidogiri) adalah badan usaha milik pondok pesantren sidogiri yang bergerak dibidang usaha ritel & swalayan, produksi, layanan, dan jasa, industri dan manufaktur serta penyerapan produk-produk UKM lainnya. Kopontren sidogiri memiliki manfaat yang besar bagi pesantren, santri, dan masyarakat. Bagi pesantren, keberadaan kopontren sangat

menunjang upaya kemandirian pesantren, karena sebagian pendapatan pesantren merupakan pemasukan dari sisa hasil usaha kopontren. Bagi santri, keberadaan kopontren selain menyediakan kebutuhan sehari-hari, juga sebagai tempat belajar kemandirian, kewirausahaan, dan pengabdian. Dan bagi masyarakat umum, kopontren menyediakan keperluan sehari-hari dengan harga yang kompetitif (Basmalah, 2018). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan mendiskripsikan keterkaitan antara modal sosial yang terlekat dalam keluarga besar pondok pesantren Sidogiri dengan efisiensi kelembagaan pada Kopontren Sidogiri, mengingat pengurus dan karyawan kopontren adalah para alumni, santri dan keluarga dalam pondok Pesantren Sidogiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan ekonomi bisa dicapai salah satunya dengan cara meningkatkan efisiensi kelembagaan. Sedangkan indikator efisiensi kelembagaan adalah biaya transaksi yang dikeluarkan rendah dan modal sosial yang berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dimanfaatkan (Lapavitsas *et al*, 2004). Sementara persyaratan agar kelembagaan ekonomi efisien, diantaranya: (1) aturan formal/ aturan tertulis harus secara jelas mendefinisikan hak kepemilikan yang dipertukarkan, agar dapat menjamin kepastian pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi (Milgrom & John Robert, 1992) (2) memperkuat sistem penegakan (Yeager, 1999) (3) aturan informal (aturan tidak tertulis) mendukung pelaksanaan transaksi (Portes, 1998). Untuk lebih jelasnya

skematis kerangka teoritis disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Efisiensi Kelembagaan, Pertumbuhan Ekonomi dan Modal Sosial

Biaya transaksi (*transaction costs*) adalah biaya untuk berjalannya pelaksanaan sistem ekonomi (Arrow, 1969). (Milgrom *et al.* 1992) mengartikan biaya transaksi merupakan biaya untuk berjalannya sistem: biaya koordinasi dan biaya motivasi. Biaya transaksi digambarkan oleh Coase sebagai “biaya pencarian dan biaya informasi, *bargaining* dan biaya keputusan, kebijakan dan biaya penyelenggaraan” (Coase, 1998). North menyebutkan biaya transaksi terdiri atas: biaya pengukuran, biaya penyelenggaraan, ideologi dan hukuman (*conviction*) (North, 1987). Williamson menjelaskan bahwa suatu transaksi akan terjadi ketika barang atau jasa dipindahkan melalui teknologi yang dihubungkan secara terpisah (Williamson, 1985). Dengan determinan biaya transaksi mencakup struktur tata kelola, atribut perilaku dari pelaku, lingkungan kelembagaan (budaya, politik, hukum), dan atribut transaksi (Milgrom, 1992).

Modal sosial didefinisikan sebagai norma, kepercayaan dan jaringan yang

terlekat dalam struktur sosial masyarakat yang dapat memfasilitasi tindakan kolektif untuk hubungan yang saling menguntungkan (Portes, 1998). Sungguhpun begitu, efek modal sosial bisa positif dan bisa negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Fine & Lapavitsas, 2004). Fungsi dasar dari modal sosial (efek positif), dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks: sebagai sumber kontrol sosial, sebagai sumber dukungan keluarga dan sebagai sumber manfaat melalui jaringan ekstra *familial*. Dari sisi lain, kerugian aktual biaya transaksi yang dimediasi modal sosial, jika ada pembatasan akses oportunitas, pembatasan kebebasan individu, klaim yang berlebihan terhadap kelompok, dan norma yang cakupannya menyempit (Portes, 1998).

Modal sosial yang mendarah daging dalam lingkungan pesantren mencakup norma atau suatu tata nilai: “keinginan untuk mendapatkan barokah”, kepatuhan terhadap kiai dan kepercayaan yakni nilai-nilai dalam bermuamalah harus jujur dan dapat dipercaya. Serta adanya jaringan yang cukup solid antara santri dengan pesantren (Kutsiyah, 2009; Fatoni, 2006; Muktirahman, 2017). Di Indonesia modal sosial yang dipengaruhi nilai-nilai keagamaan seperti pesantren dipandang lebih penting dan terintegrasi pada skala yang lebih luas terhadap beragam aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Permani, 2011).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk mengeksplorasi keterkaitan antara modal sosial dengan efisiensi

kelembagaan di Kopontren Sidogiri. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan in-depth interview dengan unsur dari pengurus kopontren baik di toko Basmalah maupun sidogiri penerbit, ustad, santri, alumni dan masyarakat di sekitar pesantren berada. Validasi data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dalam bentuk model interaktif, yang menurut Miles dan Huberman (1992) ada tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber, data, teori, dan metodologi diterapkan untuk memeriksa validitas data.

Sebagai keterangan tambahan untuk penilaian efisiensi kelembagaan dengan cara memperkirakan kecenderungan pengeluaran biaya transaksi. Definisi biaya transaksi dalam penelitian ini merunut pada pengertian yang dikemukakan Arrow yaitu biaya untuk berjalannya pelaksanaan sistem ekonomi (Williamson, 1985). Cakupannya adalah biaya motivasi (biaya informasi dan biaya komitmen yang tidak sempurna), negosiasi, penyimpangan, pengawasan, dan koordinasi. Definisi dan metodologi pengukuran tersebut dipilih, karena pertimbangan diantaranya: (1) konsep biaya transaksi sangat komplek (2) kesulitan untuk melakukan pengukuran secara langsung terhadap variabel-variabel dari determinan biaya transaksi (3) seperti yang dinyatakan Williamson (1981) pengukuran biaya transaksi yang relatif kasar sudah cukup memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cakupan modal sosial meliputi ikatan interaksi sosial (*social interaction ties /structural dimension*), norma (*norm reciprocity/ relational dimension*) and visi bersama (*cognitive dimension*) (Chang, 2016). Dimensi struktural mengacu pada pola keseluruhan hubungan antar individu, seperti ikatan interaksi sosial (jaringan). Struktural atau ikatan interaksi sosial dalam konteks Pondok pesantren Sidogiri adalah dalam bentuk pengajian rutin, ISS (ikatan santri Sidogiri), IASS (ikatan alumni santri Sidogiri), Istighozah, HMASS (Harakah alumni santri sidogiri), kebersamaan ala "pondok", haul, akhir sanah.

Pengajian dilaksanakan secara rutin baik dengan para alumni maupun masyarakat. Setiap bulan dari pondok sidogiri keliling pada tiap-tiap cabang pengurus wilayah, dimana kegiatan ini difasilitasi oleh ikatan alumni santri sidogiri menyeluruh di Indonesia. ISS (ikatan santri Sidogiri) adalah organisasi khusus untuk santri yang menangani berbagai latihan pengembangan diri, khususnya yang berkenaan dengan keorganisasian, kepemimpinan, bakat-minat dan kegiatan kemasyarakatan.

IASS dan HMASS adalah organisasi resmi alumni pondok pesantren sidogiri dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan para pendiri pondok pesantren sidogiri di bidang pendidikan dan pelatihan, hukum, dakwah & sosial, seta ekonomi & bisnis, dan untuk mewujudkan semangat kebersamaan di antara para alumni pondok pesantren sidogiri dalam berkhidmat kepada masyarakat.

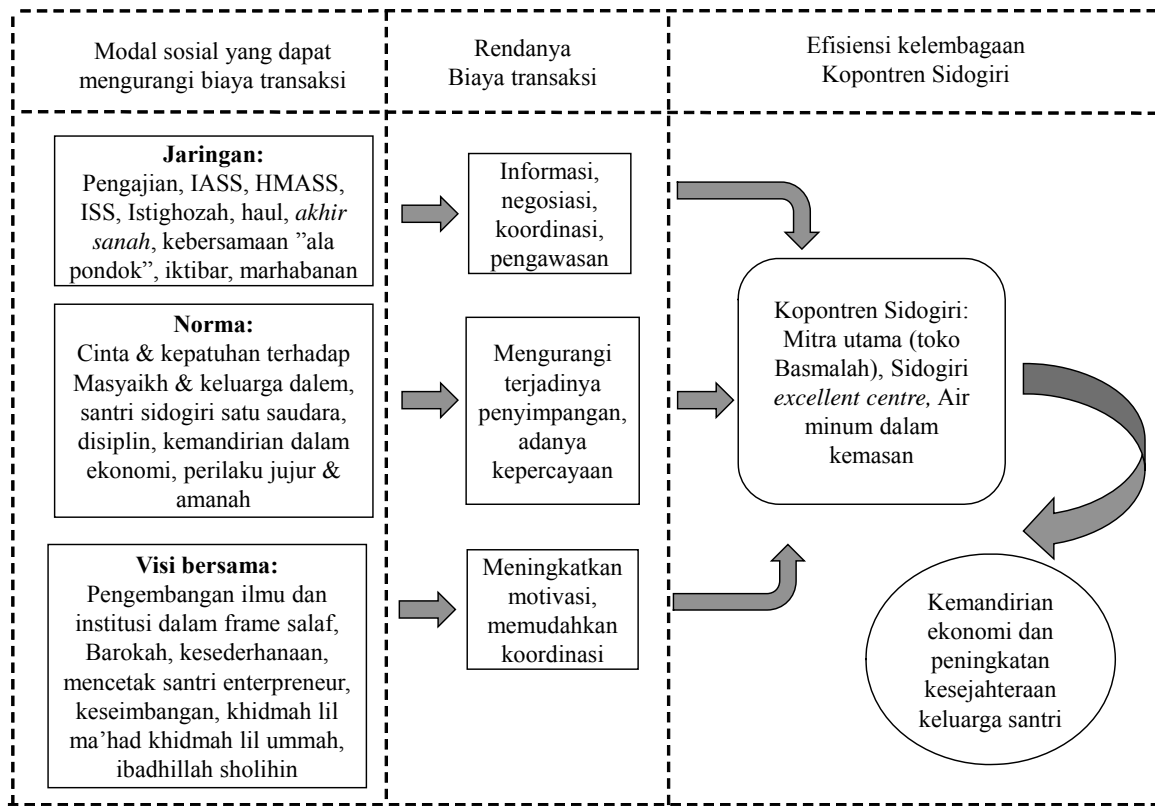
Relasi menekankan pada hubungan pribadi yang orang-orang telah kembangkan satu sama lain dari generasi ke generasi. Dimensi ini dalam bentuk norma (*norm of reciprocity*). Relasi atau norma dalam konteks Sidogiri adalah dalam bentuk cinta & kepatuhan terhadap Masyaikh & keluarga dalam, santri sidogiri satu saudara, disiplin, kemandirian dalam ekonomi, perilaku jujur & amanah. Dimensi kognitif mengacu pada sumberdaya yang memungkinkan gambaran, penafsiran dan sistem bersama yang memiliki makna diantara pihak-pihak yang terlibat dan aspek kuncinya bisa berupa bahasa, budaya dan visi bersama. Pengembangan ilmu dan institusi dalam frame salaf, barokah, kesederhanaan, mencetak santri enterpreneur, *khidmah lil ma'had khidmah lil ummah, ibadhillah sholihin*.

Ciri khas Sidogiri adalah memegang teguh budaya salaf seperti memakai sarung, ta'zhim pada kyai dan guru, menghormati tamu, ikhlas berbuat, rendah hati, zuhud untuk benar-benar mencari ilmu, mencari kebarokahan dari kiai dan semangat mengabdikan. Disinilah seorang santri akan memiliki sifat taat, tawadhu' dan hormat kepada gurunya. Diyakini bahwa dengan begitu doa dan barokah akan terus mengalir. Doa seorang pengasuh mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi kesuksesan para alumni. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa kepatuhan terhadap kyai adalah kewajiban, karena tercantum dalam undang-undang pesantren makanya wajib. Salah satu nilai-nilai yang ditanamkan di ponpes Sidogiri

adalah nilai kewirausahaan dan nilai ibadah yang semuanya terpusat pada keimanan, berupa prinsip amanah dan siddiq.

Kepercayaan di Sidogiri dibangun dengan melakukan program-program internalisasi nilai dan pentingnya mencapai nilai. Nilai dimaksud adalah *'ibadil-Lah as-Shalihin* dan barokah. Penanaman nilai dilakukan melalui program-program pengajaran, diskusi, pengajian rutin, dan sosialisasi pada rapat tahunan. Selain itu dalam masyarakat Ponpes Sidogiri dibuat aturan-aturan (norma) untuk mencapai nilai. Di samping itu dalam mengelola norma kepesantrenan, Ponpes Sidogiri membuat tata tertib secara tertulis disamping norma tidak tertulis yang sudah jadi tradisi dan budaya di lingkungan masyarakat Ponpes Sidogiri (Muktirahman 2017). Adapun Fatoni mengungkapkan bahwa menumbuhkan kepercayaan di internal Sidogiri sehingga memunculkan makna bersama. Kondisi ini dapat dilihat dari pola relasi antara koperasi, BMT UGT dengan pihak nasabah atau pemodal merupakan wujud dari kepercayaan untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan (Fatoni, 2006).

Pondok Pesantren Sidogiri merupakan salah satu pesantren yang mandiri dalam pelaksanaan operasional kegiatannya. Merujuk penjelasan pada bagian sebelumnya faktor utama yang sangat berpengaruh signifikan untuk terwujudnya kemandirian dari pesantren tersebut adalah modal sosial yang dimilikinya.



Gambar 2. Keterkaitan antara Modal Sosial, Biaya Transaksi dan Efisiensi Kelembagaan Kopontren Sidogiri

Teori modal sosial pengejawantahannya dalam bentuk jaringan, kepercayaan, dan norma (Mintin & Fafchamps, 1999). Sementara, keuntungan aktual biaya transaksi yang dimediasi modal sosial: sebagai sumber kontrol sosial, sebagai sumber dukungan keluarga dan sebagai sumber manfaat melalui jaringan (Lin, 2001). Sebaliknya kerugian aktual modal sosial terhadap biaya transaksi jika ada pembatasan akses oportunitas, pembatasan kebebasan individu, klaim yang berlebihan terhadap kelompok, dan norma yang cakupannya menyempit (Portes, 1998).

Modal sosial pesantren yang mencakup jaringan, norma dan visi bersama dapat mengurangi biaya transaksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2. Jaringan dalam hal ini berupa Pengajian, IASS, HMASS,

ISS, Istighozah, halaqoh, kebersamaan "ala pondok", iktibar, marhabanan dapat mengurangi berjalannya kegiatan ekonomi dalam aspek informasi, negosiasi, koordinasi dan pengawasan. Biaya informasi terkait pengurangan dalam biaya pencarian untuk produk, *supplier*, dan klien dari jenis usaha yang dijalankan (ritel dan grosir, layanan jasa, penyerapan produk Usaha Kecil dan Menengah, serta industri dan manufaktur). Stadler & Castrillo (1997) menyatakan, asimetri informasi seringkali terjadi karena *moral hazard*, *adverse selection* dan *signalling*. Mengingat bahwa informasi tidak sempurna dan informasi asimetri terjadi karena keterbatasan dalam memahami situasi pasar, produk, kredibilitas penawaran dan klien.

Biaya koordinasi adalah biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan penyesuaian kesepakatan antar setiap pelaku usaha yang terlibat (Williamson, 1989). Dalam koordinasi yang efektif memiliki syarat, salah satunya melalui komunikasi yang efektif dan tukar menukar informasi secara terus menerus sehingga perbedaan-perbedaan antar individu dapat diatasi dan akan membawa perubahan-perubahan kebijakan maupun program untuk masa mendatang Moekijat (Anggraeni, 2014).

Biaya negosiasi terkait kesepakatan yakni pada persetujuan yang saling menguntungkan sebagai dasar pertukaran barang dan jasa antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Sebagai keterangan tambahan, bahwa jenis kontrak dilakukan secara formal, khususnya penentuan kondisi yang diperlukan agar kontrak bisa optimal, sehingga prosedur penegakannya dapat secara otomatis, dan dispesifikasikan secara tepat tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap pihak untuk setiap kemungkinan keadaan. Biaya koordinasi terkait kunjungan ke masing-masing cabang minim mengeluarkan biaya akomodasi karena kehadiran mereka dimaknai sebagai saudara yang sedang bertamu (silaturahmi). Biaya pengawasan selalu mendapat pantauan melalui jaringan IASS di masing-masing cabang baik secara formal maupun informal. Masing-masing karyawan memiliki buku saku yang didalamnya berisi kewajiban yang harus dipatuhi, ia juga secara langsung ataupun tidak langsung menjadi bagian dari IASS dan disinilah pengawasan terhadap mereka pun terjalin dalam pertemuan pengajian ataupun

kegiatan lainnya. Ikatan alumni santri sidogiri tersebar di Indonesia. Setiap kabupaten yang memiliki alumni ada pengurus wilayah, ada 24 pengurus wilayah, setiap bulan ada pengajian dari sidogiri keliling dari pusat. Dari pusat ada akte ada anggaran rumah tangga. Kegiatan di toko basmalah ketika berkaitan dengan kegiatan IASS direkomendasikan, kalau untuk karyawan ingin daftar ke toko basmalah, menggunakan surat rekomendasi IASS. Jika tidak ada rekomendasi tidak bisa masuk toko basmalah.

Soalnya banyak dari kegiatan IASS seperti subuh berjamaah, diikuti juga karyawan basmalah. Dengan begitu untuk pemantapan hati dan juga ikatan ke pondok tidak sampai lepas. Di subuhan berjamaah ada absensi, pengajian, istighosah, halaqoh. Norma yakni perilaku jujur & amanah, cinta & kepatuhan terhadap Masyaikh & keluarga dalem, santri sidogiri satu saudara, dan disiplin dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dan adanya kepercayaan. Perilaku oportunistik atau oportunisme atau diistilahkan *free rider* dapat diminimalisasi dengan norma yang mendarah daging dalam lingkungan pesantren. Di Sidogiri dalam bisnis menggunakan istilah tauhid, iman dan takwa. Setiap hari dalam pengemblengan terhadap para santri adalah ibadah, pendidikan etika (sikap dan hati) dan pendalaman pada ilmu agama melalui tata kelola pendidikan makhadiyah dan madrasah. Nilai ibadah digunakan sebagai pedoman pendidikan kewirausahaan. Jiwa wirausaha mengutamakan nilai-nilai tawadhu, maksudnya dimulai dari spiritual dan emotional yang

ditanamkan, sementara intelektual diberikan setelah ketetapan hati (nilai-nilai tawadhu) sudah terlekat. Teng dan Das (1998) tata kelola memainkan peran penting dalam kerjasama, misalnya melalui mekanisme pengawasan dan mempengaruhi penciptaan nilai (Dyer & Singh, 1998). Kepercayaan adalah cara yang efisien untuk menurunkan biaya transaksi dalam hubungan sosial, ekonomi dan politik (Fukuyama, 1995). Kepercayaan adalah juga jauh lebih dari itu. Ini adalah fondasi dari semua hubungan manusia dan interaksi institusional, dan kepercayaan memainkan peran setiap kali kebijakan baru diumumkan (Ocampo, 2006). Dengan hubungan kerjasama yang bersifat jangka panjang, perusahaan dapat bekerja lebih efektif dengan menghemat biaya transaksi dan dapat meningkatkan daya saing. Hubungan kerjasama yang demikian biasanya ditandai dengan adanya kepercayaan yang tinggi (Morgan & Hunt, 1994). Di Sidogiri di bisnis menggunakan istilah tauhid, harus iman dan takwa, jika sdh iman sifat kejujuran itu akan muncul. Usaha harus jujur dan amanah, dengan begitu penyimpangan tidak ada. Di Sidogiri di didik takut sama Allah, otomatis sikap jujurnya ada. Bukan takut sama atasan jika hanya takut pada atasan itu hanya pencitraan. Di Sidogiri mulai awal sampai aliyah pelajaran tauhid ada mulai dari ibtidaiyah sanawiyah aliyah, jika dipupuk dari kecil begini harus bersikap jujur dan amanah jangan jahat sama orang.

Pondok pesantren ini menanamkan nilai religius, antara lain uswah alhasanah, kedisiplinan, kemandirian, kewirausahaan, nilai ibadah, akhlak dan sebagainya. Hal tersebut

dikarenakan supaya santri bisa memahami agama sepenuhnya dan tidak tergantung kepada orang lain. Kekuatan yang paling besar dari alumni Sidogiri itu adalah terletak pada persatuan dan persaudaraan mereka yang didasarkan pada ruh perjuangan Sidogiri.

Visi bersama seperti pengembangan ilmu dan institusi dalam frame salaf, barokah, kesederhanaan, mencetak santri enterpreneur, khidmah lil ma'had khidmah lil ummah, ibadhillah sholihin dapat memudahkan koordinasi dan meningkatkan motivasi. Dengan kepatuhan terhadap kiai dan visi bersama dengan harapan akhir *rahmatan lil alamin* memudahkan koordinasi antar pelaku yang melibatkan pengasuh, majelis keluarga, pengurus, santri, alumni dan masyarakat. Artinya mobilisasi kegiatan akan lebih kuat jika kyai ikut dalam manajemen dan antar institusi yang melingkupinya. Di kopontren dari direktur sampai ke bawah rata-rata dibawah umur 40, sementara Kyai yang mengarahkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah modal sosial yang terlekat dalam lingkungan pesantren dapat mengurangi biaya transaksi sehingga kelembagaan kopontren lebih efisien. Dengan jaringan yang dimiliki dapat mengurangi biaya informasi, negosiasi, koordinasi dan pengawasan. Norma dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dan adanya kepercayaan. Visi bersama dapat memudahkan koordinasi dan meningkatkan motivasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N.L.V., Muhammad, A.Z.M. & Bambang, S.H. (2014). Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(12): 2070-2076.
- Bakhri, S. M. (2004). *Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren-Belajar dari Pengalaman Sidogiri*. Pasuruan: Cipta Pustaka Utama.
- Chang, H.H., C. Y. Hung, C.Y. Huang., K.H. Wong and Y. Tsai. (2016). Social Capital and Transaction Cost on Co-Creating IT value Towards Inter-Organizational EMR Exchange. *International Journal of Medical Informatics*: 1-39.
- Chang, H.J. (1998). The Role of Institutions in Asia Development. *Asian Development Review*, 16(2): 64-95.
- Coase, R.H. (1998). *The Firm, the Market and the Law*. Chicago: University of Chicago Press.
- Das T. K. & Teng, B.S. (1998). Between Trust and Control: Developing Confidence in Partner Cooperation in Alliances. *The Academy of Management Review*. 23(3): 491-512.
- Dyer, J.H. & Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage. *The Academy of Management Review*, 23(4): 660-679.
- Fine, B., & Lapavitsas, C. (2004). Social Capital and Capitalist Economies. *ASECU South Eastern Europe Journal of Economics*, 1: 17-34.
- Fukuyama, F. (1995). *The Social Witness and The Creations Of Prosperity*. New York: Free Press
- Kutsiyah, F. (2009). Analisis Kinerja Program bantuan Pinjaman langsung Masyarakat Melalui Lembaga pesantren di Madura. *Jurnal Agro Ekonomi (JAE)*, 27(2): 109-134.
- Lin, N. (2001). *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge University Press.
- Maulani, A. (2016). Pembaruan Dan Peran Sosial Transformatif Pesantren Dan Islam Indonesia. *Sosiologi Reflektif*, 10(2): 159-184.
- Miles, M.B., & Huberman, M.A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Depok: Universitas Indonesia, Press.
- Milgrom, Paul., & Robert, J. (1992). *Economics, Organization and Management*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Morgan & Hunt, (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. *Journal of Marketing*, 20-38.
- Permani, R. (2011). The Presence of Religious Organisations, Religious Attendance and Earnings: Evidence from Indonesia. *The Journal of Socio-Economics*, 40: 247-258.
- Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origin and Applications in Modern Sociology. *Annual Review Sociology*, 24: 1-24.
- Reginald, A.R. & Mawardi, I. (2014). Kewirausahaan Sosial pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. *JESTT*, 1(5): 333-345.

- Stadler, M.I., & Castrillo, J.D. 1997. *An Introduction to the Economics of Information: Incentives and Contracts*. Oxford University Press.
- Streeten, P. (2002). *Reflection on Social and Antisocial Capital: Social Capital and Economic Development: Well-being in Developing Countries*. UK.
- Wallis, J., Killerby, P., & Dollery, B. (2004). Social Economics and Social Capital. *International Journal of Social Economics*, 31(3): 239-578.
- Williamson, O. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism. Firm, Market, Relational Contracting*. New York: The Free Press.
- Williamson, O. (1990). *Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations. Industrial Organization*. UK: An Elgar Critical Writing Reader.
- Woolcock, M. (1998). Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework. *Theory and Society*. 27: 151-208.
- Yeager, T.J. (1999). *Institutions, Transition Economies and Economic Development*. Westview Press.